

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK
(KIA) OLEH UNIT PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial Disusun Untuk
Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program
Pendidikan Srata Satu Program Studi
Administrasi Negara*



OLEH :

MAIMUNA
NPM. 220411002

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : Juni
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA


SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

SEKRETARIS


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

1. DESRIADI, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) 
2. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si (Anggota Penguji I) 
3. RISVANDI, S.Pd., M.Si (Anggota Penguji II) 

Mengetahui,
Dekan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002T

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

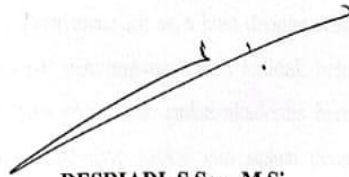
JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : MAIMUNA
NPM : 220411002
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021177902

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : MAIMUNA
NPM : 220411002

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 18 Juni 2026



MAIMUNA
NPM. 220411002

MOTTO

“Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia”

(Nelson Mandela)

“Belajat dari kamaren, hidup untuk hari ini, berharab untuk esok. Yang penting adalah jangan berhenti bertanya”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah*. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu, yang tidak pernah berhenti memberikan cinta, doa, dan dukunga,serta pengerbonan yang tidak ternilai harganya. Terimakasih atas segala usaha yang telah diberikan demi pendidikan saya, atas setiap doa yang selalu mengiringi langkah saya, serta atas kesabaran dalam membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.

Kepada adik tersayang, terima kasih atas semangat, keceriaan, serta dukungan yang selalu diberikan kepada saya. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan saya untuk terus berjuang dan menjadi contoh yang lebih baik untukmu nantinya.

Kepada sahabat saya Rahmiati. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan saling menyemangati selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Kebersamaan kita adalah bagian bahagia yang tidak akan pernah terlupakan.

Dan yang terakhir, untuk diri sendiri saya. Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang harus dilalui. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik di masa depan.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita, serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

MAIMUNA
NPM. 220411002

KATA PENGANTAR

رومكيدعم لاسلامه ت ا ك ربوالله اة

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya. terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah* yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadapan (*yukhrijuhum min azh-zhulumat ila an-nur*) mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Sebuah penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**, yang penulis angkat merupakan kajian dan telaah mencoba menemukan sebuah urgensi implemntasi dari suatu agenda kebijakan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di Kenegerian Kopah.

Manfaat penelitian ini hendaknya dapat memberikan kontribusi kepada objek yang diteliti, sehingga memberikan rekomendasi sebagai acuan memperbaiki program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kenegerian Kopah.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian penelitian ini penulis tidak menafikan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil, moril maupun dukungan spirituul berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran

serta doa yang begitu besar terhadap penulis. Sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah membantu terbentuknya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu **Dr.Ikrima Mailani,S.Pdi** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan M., S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak **Alsar Andri, S.Sos., M.Si** selaku ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak **Desriadi S.Sos., M.Si** selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan demi tercapainya penyelesaian proposal ini serta sudah banyak memotivasi penulisan untuk sabar dan tegar.
5. Bapak **Sahri Muharam, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan demi tercapainya penyelesaian proposal ini serta sudah banyak memotivasi penulis untuk tetap sabar dan tegar.
6. Seluruh dosen dan tenaga dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Yusmardi** dan Ibunda **Arbainis**.Terimakasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayanngnya yang tidak terhingga, cucuran keringat dan air mata serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya.
8. Saudara penulis, **Salsa Bilatul Khaira** dan **Habib Alhasby** yang telah senantiasa meberikan semangat dan kasih saying. Semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis masih merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan menuju penelitian selanjutnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

رومكيدعم لاسل ا وحه تا ك ربوالله اة

Teluk Kuantan, 18 Juni 2026

Penulis

MAIMUNA
NPM. 220411002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS	iii
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK INDONESIA	xvi
ABTRAK INGGRIS	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori/ Konsep Ilmu Administrasi Negara	10
2.1.2 Teori/ Konsep Kebijakan Publik	14
2.1.2.1 Formulasi Kebijakan Publik	17
2.1.3 Teori/ Konsep Implementasi Kebijakan Publik	20
2.1.4 Teori/ Konsep Administrasi Kependudukan	30
2.1.4.1 Administrasi Kependudukan di Daerah.....	31
2.1.4.2 Administrasi Kependudukan di Kuansing.....	32

2.1.4.3 Administrasi Kependudukan Identitas Anak.....	33
2.1.5 Teori/ Konsep Kartu Identitas Anak.....	33
2.2 Kerangka Pemikiran.....	39
2.3 Hipotesis	39
2.4 Defenisi Operasional.....	40
2.5 Konsep Operasional Variabel	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Informan.....	43
3.3 Sumber Data.....	44
3.3.1 Data Primer	44
3.3.2 Data Sekunder.....	45
3.4 Fokus Penelitian.....	45
3.5 Lokasi Penelitian.....	45
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	: Data Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kuantan Singingi	6
1.2	: Data Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kenegerian Kopah	7
1.3	: Data Jumlah Anak di Kenegerian Kopah	7
2.1	: Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kuantan Singingi.....	36
2.2	: Indikator Kebijakan Menurut Para Ahli	38
2.3	: Konsep Operasional Variabel Tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	41
3.1	: Informan Penelitian Tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	44
3.2	: Jadwal Penelitian Tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	: Kartu Identitas Anak Umur 5-17 Tahun	5
2.1	: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	39
4.1	: Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I : Daftar Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	54
II : Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	62
III : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 071/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025 Tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.....	67
IV : Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 102/FIS/UNIKS/IX/2025 Tentang Permohonan Riset	68
V : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 227/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	69
VI : Surat Balasan Riset Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Penelitian Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	70
VII : Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian Tentang Implementasi Program Kartu Identitas	

	Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	71
VIII	: Lembaran Persetujuan untuk Revisi Proposal Penelitian tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	74
IX	: Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	75
X	: Daftar Riwayat Hidup Penulis	76

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**OLEH :
MAIMUNA
NPM: 220411002**

Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengkaitkan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian diinterpretasikan terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta diberikan saran. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kabid PIAK, Staf bagian KIA, dan Masyarakat. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi cukup terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Identitas Anak (KIA)

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE CHILD IDENTITY CARD (KIA) PROGRAM BY THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IMPLEMENTATING UNIT OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

**BY :
MAIMUNA
NPM: 220411002**

The Child Identity Card (KIA) serves as an official form of identification for unmarried children under the age of 17; it is valid nationwide and integrated into the Population Administration and Information System. This study was conducted at the Population and Civil Registration Agency of Kuantan Singingi Regency. The objective of the research was to examine the implementation of the Child Identity Card (KIA) program in Kuantan Singingi Regency. A qualitative method was employed for the analysis; collected data were analyzed by elaborating on and linking relevant theories to the issues at hand, interpreting the findings, and subsequently drawing conclusions and offering recommendations. The study population consisted of the Head of the Population Administration and Information (PIAK) Division, KIA staff members, and the general public. Data collection methods included observation, interviews, and document review. The research findings indicate that the implementation of the Child Identity Card (KIA) program by the Population and Civil Registration Agency of Kuantan Singingi Regency has been carried out effectively.

Keywords: Implementation, Child Identity Card (KIA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan beragam suku, budaya dan bahasa. Ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam rangka memberikan pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat, maka pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berupaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan nasional. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan pasal 1 menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor publik.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterahkan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuan pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi

anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang tidak memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Program KIA diharapkan dapat menjadi penyelamat anak yang usianya kurang dari 17 tahun karena memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), sebagaimana halnya seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi 2020). Untuk mewujudkan ini semua dibuatlah sebuah program pemerintah untuk anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang di beri nama Kartu Identitas Anak (KIA).

Program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah suatu alat kebijakan pemerintah berupa kartu identitas resmi yang ditujukan khusus untuk anak dibawah umur dan belum menikah yang hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Program yang ada di Kartu

Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melakukan kerjasama MoU ke sekolah-sekolah dan kelurahan/desa agar masyarakat membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

KIA memiliki banyak manfaat strategis, tidak hanya sebagai dokumen identitas, tetapi juga sebagai alat pendukung pelayanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Dengan KIA, anak-anak akan lebih mudah mengakses layanan publik dan swasta, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga akses terhadap fasilitas umum yang memerlukan identifikasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan KIA bukan sekadar administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap eksistensi anak sebagai subjek hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah berharap seluruh anak Indonesia memiliki bukti identitas diri berupa KIA sebagaimana identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) yang dimiliki penduduk usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA) akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan system untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. (Permendagri Nomor 2 Tahun 2016).

Diharapkan dengan adanya program Kartu Identitas Anak (KIA) dapat menjadi solusi dari masalah kependudukan, khususnya bagi anak. Dengan adanya KIA ini juga akan memudahkan orang lain yang membutuhkan bukti diri anak tersebut. Regulasi yang mendasari pelaksanaan KIA yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan peraturan daerah kabupaten kuantan Singingi nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 3 menyatakan persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan Akta Kelahiran, sedangkan bagi anak yang telah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki KIA dengan melampirkan persyaratan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) asli dan KTP elektronik Orang tua/wali dan foto anak bersangkutan yang telah disimpan di dalam CD.

Di kabupaten kuantan Singingi, khususnya di kecamatan kuantan Tengah implementasi program KIA menjadi tanggung jawab Unit pelaksanaan teknis (UPT) dinas kependudukan dan pencatatan sipil. UPT ini berperan sebagai pelaksanaan teknis yang menjamin masyarakat dengan sistem administrasi kependudukan. Di kabupaten kuantan Singingi, program kartu identitas anak (KIA) mulai di laksanakan pada tahun 2019. Namun, dalam pelaksanaan program KIA di wilayah ini masih terdapat berbagai tantangan seperti kurangnya

pemahaman masyarakat tentang pentingnya KIA, keterbatasan sarana prasarana serta koordinasi antar pihak yang belum optimal. Berikut contoh gambar Kartu Identitas Anak (KIA) umur 5-17 Tahun.

Gambar 1.1 Kartu Identitas Anak umur 5-17 Tahun



Dari kondisi lapangan terdapat beberapa fenomena yang terjadi dalam penerbitan KIA sebagai berikut :

1. Masyarakat beranggapan bahwa apabila telah ada akta kelahiran tidak perlu lagi KIA.
2. Masyarakat beranggapan bahwa dalam pengurusan KIA memerlukan waktu yang cukup lama .
3. Pemerintah desa terkesan tidak berperan karena pengurusan KIA melalui pihak sekolah.

Dari fenomena yang terjadi maka menimbulkan beberapa permasalahan dalam proposal penelitian ini :

1. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengurusan KIA.
2. Tidak berperan pemerintah desa dalam pembuatan KIA kepada masyarakat. Sementara data kependudukan merupakan kewenangan Desa.

Tabel 1.1 Data Pencetakan KIA di Kab. Kuantan Singingi Tahun 2020-2025

No	Wilayah	Pencetakan KIA (LK)	Pencetakan KIA (PR)	Pencetakan KIA (JMLH)
1.	Kuantan Mudik	1.275	1.138	2.413
2.	Kuantan Tengah	2.781	2.449	5.230
3.	Singing	2.283	1.926	4.209
4.	Kuantan Hilir	723	725	1.448
5.	Cerenti	740	708	1.448
6.	Benai	828	801	1.629
7.	Gunung Toar	589	530	1.119
8.	Singing Hilir	2.113	1.639	3.752
9.	Pangean	768	706	1.474
10.	Logas Tanah Darat	1.118	1.011	2.129
11.	Inuman	692	622	1.314
12.	Hulu Kuantan	548	575	1.123
13.	Kuantan Hilir Seberang	431	434	865
14.	Sentajo Raya	2.221	2.110	4.331
15.	Pucuk Rantau	541	503	1.044

Tabel 1.2 Data pencetakan KIA di Kenegrian Kopah dari Tahun 2020-2025

No.	Wilayah	Pencetakan KIA (LK)	Pencetakan KIA (PR)	Pencetakan KIA (JMLH)
1.	Pulau Baru	41	23	64
2.	Koto Tuo	23	27	50
3.	Kopah	18	21	39
4.	Munsalo	118	130	248
5.	Jaya	44	35	79
6.	Titian Modang Kopah	49	52	101

Sumber: Disdukcapil 2025

Tabel 1.3 Jumlah Anak di Kenegrian Kopah

No.	Wilayah	2025			2024			2023			2022			2021			2020		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
1.	Pulau Baru	182	149	331	184	149	333	169	142	311	168	138	306	162	143	305	168	144	307
2.	Koto Tuo	102	97	199	101	96	197	111	96	207	110	101	211	121	121	242	137	130	267
3.	Kopah	90	87	177	88	86	174	91	97	188	87	93	180	85	87	172	88	79	167
4.	Munsalo	341	332	673	355	335	690	347	311	658	331	310	641	329	291	620	326	285	611
5.	Jaya	233	235	468	250	243	493	233	233	466	225	239	464	250	277	527	289	306	595
6.	Titian Modang Kopah	332	316	648	344	321	665	334	301	635	307	276	583	306	287	593	286	281	567

Sumber: Disdukcapil 2025

Dari permasalahan tersebut maka penulis membuat judul proposal penelitian adalah **“Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah “bagaimana implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis maka dalam hal ini yang menjadi tujuan pelaksanaan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang program Kartu Identitas Anak (KIA) dan mengembangkan pola berfikir melalui penulisan dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan dijadikan bahan pertimbangan khususnya kepada pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/ Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *minitrare*, yang berarti “membantu, melayani, dan memenuhi”. Di Indonesia disebut Administrasi dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yaitu, yang pertama *administratie* dari bahasa Belanda, yang berarti tata usaha dalam arti sempit. Kemudian *bestuur*, yaitu manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua *administration* yang berasal dari bahasa inggris, yaitu proses kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian ada beberapa hal yang terdandung dari pengertian administrasi, yaitu, sekelompok orang, kegiatan, kerja sama, tujuan, dan efisien.

Administrasi berasal dari bahasa Belanda, “*administratie*” yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik ,komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda (pekerjaan–Pekerjaan Tata Usaha kantor) Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, “*Administrare*” yang artinya adalah melayani, maka Kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara gamblang dapat Diartikan Bahwa Administrasi mempunyai pengertian : “pelayanan kegiatan tata usaha kantor”(pelayanan pengetikan/komputer, pelayanan surat menyurat , dan lain sebagainya).

Jadi administrasi adalah suatu fenomena sosial dan hidup subur dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Setiap individu berfungsi sebagai sumber daya publik sekaligus sumber daya administrasi.

Administrasi adalah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendaya gunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Silalahi (dalam Zulkifli, 2014 : 11).

Administrasi Negara diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik titik proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga fungsi tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai titik di tingkat menengah, yaitu proses manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang harus terus berlangsung lama seperti memberikan bahan, sasaran, instruksi-instruksi, dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi pengawasan. Dalam kontak langsung dengan pekerjaan-pekerjaan profesional dan teknis fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Anggara, 2012 : 11).

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bukunya administrasi pembangunan konsep, dimensi, dan strategi (Siagian, 2011 : 14).

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Syafi'i, 2010 : 14).

George J. Gordon bahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan (dalam Syafi'i, 2010 : 33).

Administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2014 : 2).

Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional (Pasalong, 2011 : 3).

Menurut Pfiffner dan Presthus memberikan penjelasan mengenai Administrasi Negara sebagai berikut:

- a) Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

- b) Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c) Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap jumlah orang (Syafi'i, 2013 : 31).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari peraturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dalam proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang apabila salah satu unsurnya tidak ada, proses administrasi akan pincang unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut : (Anggara, 2012 : 29).

- a. Organisasi, yaitu ada bagi segenap kegiatan usaha kerjasama
- b. Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dengan mengarahkan fasilitas kerja. hubungan ini meliputi:
 - a) Perencanaan
 - b) Pembuatan keputusan
 - c) Pembimbingan
 - d) Pengorganisasian
 - e) Pengawasan (*control*)
 - f) Penyempurnaan yang paling perbaikan tata struktur dan tata kerja

- c. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada orang lainnya dalam rangka terwujudnya kerjasama
- d. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan
- e. Keuangan, yaitu pengelolaan dalam segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan
- f. Pembekalan, yaitu perencanaan pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja
- g. Tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan
- h. Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha

2.1.2 Teori/ Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik (Suharto, 2020 : 2). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihanpilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Selain itu, Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak

bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi titik penetapan kebijakan merupakan suatu faktor yang penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Parker kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis (dalam Kusumanegara, 2010 : 4).

Menurut Friedrich mengartikan kebijakan adalah serangkain tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2014 : 8).

Menurut Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau menjawab pemerintah saja (dalam Pasalong, 2013 : 39).

Parsons memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan publik. Menurutnya kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penelitian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk

mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (dalam Tahir, 2014 : 24).

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut dengan konvensi-konvensi. Contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang kebijakan publik maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terwujudnya cita-cita bersama.

Pada umumnya kebijakan publik dapat dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu :

- a. *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang;
- b. *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin;
- c. *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu; dan *Consistent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

Menurut Nugroho yang dikutip oleh Harbani Pasolong, kebijakan publik itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum.
- b. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.
- c. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Walikota.

2.1.2.1 Formulasi Kebijakan Publik

Proses pembuatan Kebijakan Publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tahapan kebijakan public menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno dalam (Afdal, 2015) adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penyusunan agenda

Sebelum melakukan perumusan kebijakan terlebih dahulu dilakukan penetapan agenda kebijakan, untuk menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Pada hakikatnya permasalahan ditemukan melalui proses problem Structuring, dimana isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada

agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-

badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementor*). Namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang akan dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain: (Suharno, 2010 : 22-24)

- a. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.

- c. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- d. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- e. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

2.1.3 Teori/ Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam sebuah kebijakan sangat penting, dimana implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implemet*". Kata to implement berasal dari bahasa latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan *to fill up, to fill in* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya yaitu to fill yaitu mengisi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Menurut Widodo mengatakan bahwa, implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta

(individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Sutujo, 2015 : 4).

Implementasi juga di artikan sebagai salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan Evaluasi (Edi Suharto, 2012 : 78).

Menurut Gordon impelementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumeninstrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (dalam Mulyadi, 2018 : 24-47).

J.L. Pressman dan Aaron B. Wildavsky implementasi adalah suatu proses interaksi antara seperangkat tujuan dan tindakan, sehingga menjadi jaringan yang tidak transparan (dalam Subianto, 2020 : 22). Berikut pengertian implementasi dalam buku Analisis kebijakan publik karya subarsono :

- a. Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
- b. Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- c. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (*implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.
- d. Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- e. Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy*

Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program.

Sedangkan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Pelaksana atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu (Hamdi, 2014). Menurut Anderson (Tahir, 2014 : 56-47), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
- b. Hakikat proses administrasi
- c. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
- d. Efek atau dampak implementasi

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik yang menurut Djaja Saefullah dalam (M. Tahir, 2020 : 20-56) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif yakni :

- a. pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik didalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik didalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.
- b. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan didalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujud.

Mazmanian dan Sebastier menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana dilapangan dan aktor individu selaku kelompok target” (Tahir, 2014 : 56).

Sedangkan menurut Meter dan Carl implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya (Pratama, 2013 : 230). Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usahausaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Menurut Edward Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya ,jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan,maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (dalam Winarno, 2012 : 125).

Model-model Implementasi Kebijakan di bagi menjadi beberapa model yaitu : (Meyzi Heriyanto, 2019). Model kebijakan publik yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini menegaskan bahwa Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa indikator variabel yang memengaruhi proses kebijakan publik adalah :

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

- b. Karakteristik dan agen pelaksana/ implementator
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/ implemmentor.

Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menegaskan bahwa, Implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, mengklarifikasi proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yakni :

1. Variabel Idenpenden

Mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indiaktor masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki.

2. Variabel Intervening

Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsisten tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya dan dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembagapelaksana, dan perekrutan implemmentor kebijakan serta keterbukaan kepada pihak luar.

3. Variabel Dependen

Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu:

- a. Pemahaman dari lemabaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana
- b. Kepatuhan obyek
- c. Hasil nyata

- d. Pemerintah atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada
- e. Revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model selanjutnya yaitu menurut Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern & David O'Porter (1981), menegaskan bahwa: “Model ini di mulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki”. Model ini juga mengedepankan dua variabel utama, Yaitu :

1. *Content of policy & contex implementation*, meliputi:
 - a. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
 - b. jenis manfaat yang akan dihasilkan
 - c. derajat perubahan yang diinginkan
 - d. kedudukan pembuat kebijakan
 - e. pelaksana program
 - f. sumber daya yang dikerahkan. Dan Konteks Implementasinya, meliputi : kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap. Sementara.
2. dampak (*impact*) dari kebijakan itu sendiri, meliputi :
 - a. manfaat dari program
 - b. Perubahan dan peningkatan kehidupan kepada masyarakat.

Smit (1973) memandang bahwa proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Ada empat variabel kebijakan menurut Smit yaitu :

1. Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definsikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.
2. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Edward III dalam bukunya “*Implementing Public Policy*”, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Pendapat George Edward III yang mengembangkan model dengan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Berarti tanpa sumber daya yang memadai implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, Informasi, Wewenang atau kewenangan dan Fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan atau sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksana program. Ada dua unsur atau bagian dalam hal ini, yaitu : 1). Prosedur rutin atau standart prosedur operasi dan 2). Fragmentasi (pemecahan/ pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

2.1.4 Teori/ Konsep Administrasi Kependudukan

Kata administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *administrate* yang berarti *to manage*. Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengertian luas administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan di pimpin secara efektif dan efesien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi mempunyai fungsi-fungsi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan fungsi pengawasan. Dalam arti sempit, administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, dan sebagian yang bersifat ketatausahaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya dan politik . Dan yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di negara tersebut.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan diarahkan yaitu untuk :

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional;

- b. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
- e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Sistem informasi administrasi kependudukan dimaksud untuk :

- a. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional;
- b. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
- c. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional; dan
- d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

2.1.4.1 Administrasi Kependudukan Daerah

Administrasi Kependudukan Daerah dapat didefinisikan sebagai system pengelolaan data dan informasi tentang penduduk di suatu wilayah administratif (seperti Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Administrasi Kependudukan Daerah Provinsi Riau di atur dalam Peraturan Daerah Riau Nomor 4 Tahun 2018.

Administrasi kependudukan di daerah juga didefinisikan sebagai proses sistematis pengelolaan data dan informasi tentang penduduk dalam suatu wilayah administratif, yang meliputi registrasi kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan status kependudukan lainnya. Pada Administrasi Kependudukan Daerah pentingnya integrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan akurasi data, efisiensi layanan publik, dan pengambilan keputusan berbasis data demografi. Dalam konteks desentralisasi, administrasi kependudukan di daerah berfungsi sebagai fondasi untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan pemantauan kebijakan sosial. Efektivitas administrasi kependudukan bergantung pada teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas-sektor, dengan tujuan utama mencegah kesenjangan data yang dapat memicu masalah seperti ketimpangan sosial atau kesalahan kebijakan. Untuk mewujudkan Administrasi Kependudukan yang efisien efektif dan berkualitas maka diperlukan peraturan tentang administrasi kependudukan sesuai tugas pokok, fungsi dari kewenangan pemerintah provinsi Riau sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Indonesia 2006).

2.1.4.2 Administrasi Kependudukan Dikuansing

Pengelola Administrasi Kependudukan dikuansing merupakan tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang diatur dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2015. Administrasi kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dapat didefinisikan sebagai sistem pengelolaan data demografis dan identitas penduduk yang

terintegrasi dengan dinamika sosial-ekonomi daerah, dengan fokus pada pengelolaan migrasi, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kuansing dengan instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah desa, untuk memastikan data akurat mendukung kebijakan seperti pengembangan infrastruktur, pengendalian migrasi, dan pengurangan kemiskinan.

2.1.4.3 Adminitrasi Kependudukan Identitas Anak

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan Identitas Anak merupakan sebuah tanda pengenal yang berikan kepada anak yang berusia dibawah 17 Tahun dan belum menikah. Dengan adanya Administrasi kependudukan Identitas Anak ini maka memudahkan dalam pengurusan Administratif anak.

2.1.5 Teori/ Konsep Kartu Identitas Anak

Program Kartu Identitas Anak merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah di 50 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2016. Program ini menjadi salah satu pelayanan kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penertiban dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil.

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak diperuntukkan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Definisi Kartu Identitas Anak dalam Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah suatu alat kebijakan pemerintah berupa kartu identitas resmi yang ditujukan khusus untuk anak dibawah umur dan belum menikah yang hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Novianti 2019).

Program yang ada di Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melakukan kerjasama MoU ke sekolah-sekolah dan kelurahan/desa agar masyarakat membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

Dalam pembuatan Kartu Identitas Anak terdapat beberapa Prosedur penerbitan menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak diuraikan sebagai berikut :

- a. Batasan terakhir usia terhadap kepemilikan KIA adalah 17 tahun kurang satu hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP.
- b. Pemberlakuan KIA ada dua macam yaitu untuk usia 0-5 tahun dicetak tanpa foto, dan untuk usia diatas 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari dicetak menampilkan foto.

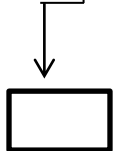
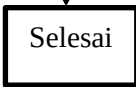
Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak

No	Anak WNI	No	Anak Orang Asing
1.	Kurang dari 5 tahun: a. Mengisi formulir KIA, b. FC akta kelahiran & menunjukkan asli c. KK asli orang Tua/wali d. KTP-el orang tua/wali	1.	Kurang dari 5 tahun : a. Mengisi formulir KIA b. FC passport & izin tinggal tetap c. KK asli orang tua/wali d. KTP-el orang tua/wali
2.	Usia 5th s/d 17th (-) 1 hari : a. Mengisi formulir KIA FC akta kelahiran & menunjukkan asli b. KK asli orang tua/wali c. KTP-el orang tua/wali d. Pas photo berwarna 3x4	2.	Usia 5th s/d 17 th (-) 1 hari a. Mengisi formulir KIA b. FC passport & izin tinggal tetap c. KK asli orang tua/wali d. KTP-el orang tua/wali e. Pas photo berwarna 3x4
3.	Masa berlaku : a. Kurang dari 5 tahun adalah sampai anak usia 5 tahun b. Lebih dari 5 tahun adalah anak berusia 17 tahun (-) 1 hari.	3.	Masa berlaku : Sesuai dengan izin tinggal tetap orang tua

Sumber: Buku *Kartu Identitas Anak (KIA)*, 2017

Tabel 2.1 SOP penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kepala Dinas	Kabid CAPIL	ADB	ADB/ Operator	Pemohon	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima dan memeriksa persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak					Mulai	Berkas lengkap	5 Menit	Berkas Pemohon
2.	Petugas menerima berkas memeriksa kelengkapan berkas						Berkas pemohon	1 Menit	Hasil Verifikasi
3.	Petugas melakukan scan pada foto pemohon penerbitan KIA						Berkas pemohon	5 Menit	Ditindaklanjuti
4.	ADB memverifikasi kecocokan data dengan berkas dan dibuatkan catatan hasil verifikasi						Berkas pemohon	5 Menit	Berkas sudah teregister dan sudah valid
5.	Kepala Bidang membubuhkan oaraf hasil verifikasi						Berkas pemohon lengkap	5 Menit	Data/berkas yang sudah sudah valid catatan hasil verifikasi
6.	Operator menarik data						Berkas sudah	5 Menit	Data/berka

	dan mencetak KIA						diverifikasi dan teliti		s yang sudah teliti
7.	Petugas Operator melakukan aktivasi						KIA	5 Menit	Data/berkas yang sudah valid catat dan hasil verifikasi
8.	KIA diserahkan kepada pemohon						KIA	5 Menit	KIA selesai diproses
9.	Pemohon Mengambil KIA di counter pengambilan/ pelayanan oleh pemohon dan dipakai						KIA selesai	2 Menit	KIA diserahkan kepada pemohon

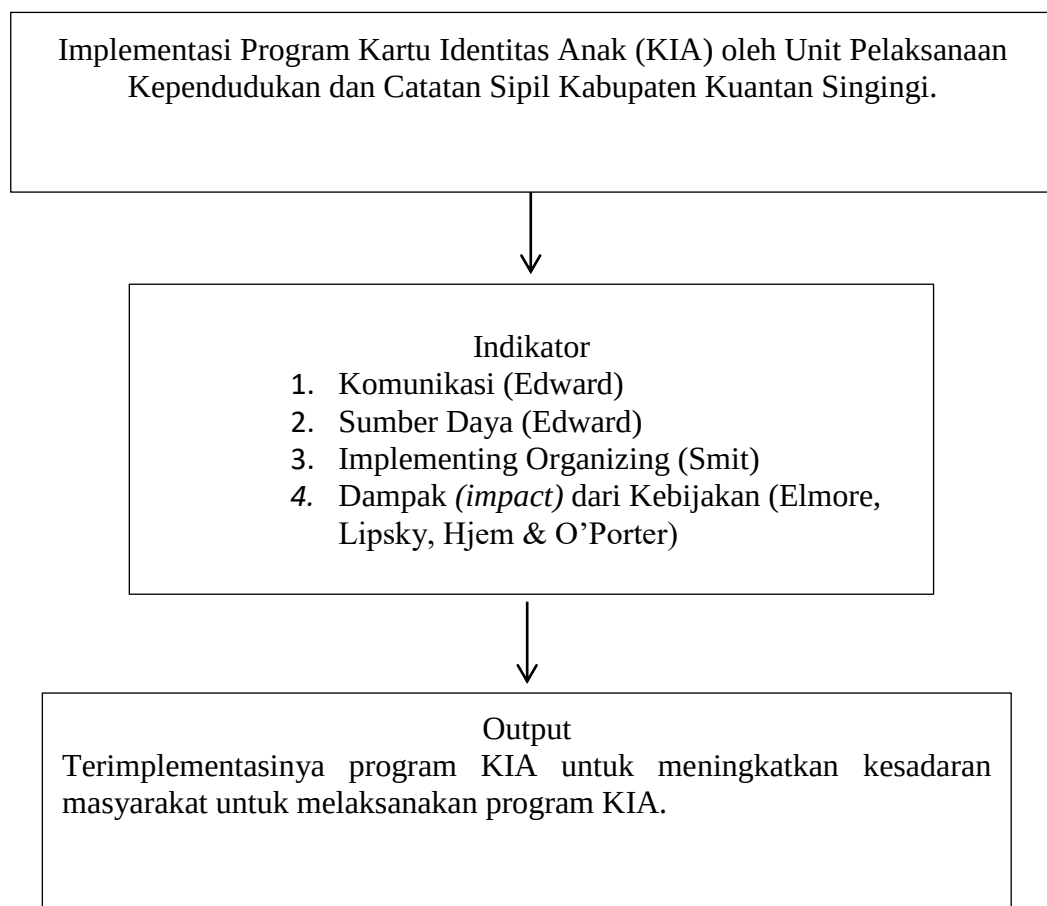
Sumber: Disdukcapil 2025

Donald Van Meter & Carl Van Horn	Mazmania & Paul A. Sabatier	Richard Elmore, Michael Lipsky Benny Hjren & David O'Porter	Smit	Edward
1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi 2. Karakteristik dan agen pelaksana/ implementor 3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik 4. Kecenderungan pelaksana/ implementor	1. Variabel Independen 2. Variabel Intervening 3. Variabel Dependen	1. Content of policy & context 2. Dampak (impact) dari kebijakan itu sendiri	1. Kebijakan yang di idealkan 2. Kelompok sasaran 3. Implementing organization 4. Environmental factor	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi

Tabel 2.2 Indikator Kebijakan menurut para ahli

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singing



Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil dugaan sementara atau hipotesis dikatakan sementara karena kalimat yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan. Hipotesis penelitian ini adalah masih belum terimplementasinya Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Defenisi Operasional

Konsep operasional adalah semacam pelaksanaan bagaimana cara mengatur variabel. Konsep variabel merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam indikator yang lebih memudahkan operasional dari suatu penelitian.

Adapun variabel yang akan diteliti dalam hal ini yaitu tentang implementasi program kartu identitas anak, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Berarti tanpa sumber daya yang memadai implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, Informasi, Wewenang atau kewenangan dan Fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

3. *Implementing organization*

yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

4. dampak (*impact*) dari kebijakan meliputi:

- a. manfaat dari program
- b. Perubahan dan peningkatan kehidupan kepada masyarakat

2.5 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	1. Komunikasi	1. Efektivitas penyampaian informasi	a. Sangat baik
		2. Koordinasi antar pihak	b. Baik
		3. Umpan balik (Feedback)	c. Cukup baik
	2. Sumber Daya		d. Tidak baik
			e. Sangat tidak baik
		1. Ketersediaan SDM	a. Sangat baik
		2. Alokasi sumber daya finansial	b. Baik
		3. Infrastruktur pendukung	c. Cukup baik
			d. Tidak baik
			e. Sangat tidak baik
3. Implementing Organizing		1. Struktur organisasi	a. Sangat baik
		2. Perencanaan kegiatan	b. Baik
		3. Efektivitas pelaksana	c. Cukup baik
			d. Tidak baik
			e. Sangat tidak

	4. Dampak (<i>impact</i>) dari kebijakan	1. Dampak sosial 2. Dampak ekonomi 3. Dampak berkelanjutan	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Tidak baik e. Sangat tidak baik
--	--	--	--

Tabel 2.3: Konsep Operasional Variabel tentang Implementasi Kartu Identitas

Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif ialah penelitian dengan cara menggambarkan hasil penelitian dalam gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang teliti dengan melakukan pengamatan atau observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Metode deskriptif kualitatif ini lebih banyak menggunakan teknik analisis yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi melainkan suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar bukan angka-angka (Trisliatanto, 2020 : 213).

3.2 Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang akan di teliti. Karena tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan

jumlah responden yang dijadikan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2010). Jadi, Purposive Sampling dilakukan untuk mencari narasumber sebagai key informan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan tempat penelitian diantaranya yaitu :

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1.	Kabid PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	1
2.	Staf bagian KIA	1
3.	Masyarakat	8
Total Jumlah Informan		10

Tabel 3.1 Informant Penelitian

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan yang diberikan oleh responden dilapangan. Data tersebut dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), serta melakukan observasi (pengamatan langsung dilapangan) dan dokumentasi.

Data primer menurut Hasan adalah data yang didapat langsung di lapangan oleh peneliti atau orang yang memerlukannya (Inadjo et al., 2023).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebagai pendukung untuk menambah pemahaman mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA).

Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundangundangan.

Sumber data yang didapatkan dengan tidak langsung, dan secara tersirat menyediakan data kepada penghimpun data (Sugiyono, 2010).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada bagaimana pemerintah kabupaten kuantan singing berperan dalam mensosialisasikan Karti Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat supaya anak yang berusia di bawah 17 tahun mempunyai kartu tanda pengenal seperti anak yang berusia 17 tahun keatas.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kenegrian Kopah karena untuk mengetahui penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a) Observasi

Observasi ialah mengamati secara langsung objek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pegawai dalam menjalankan tugasnya, sehingga data yang diperlukan benar-benar dapat di pertanggung jawabkan.

b) Wawancara

Wawancara (*Interview*) yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Teknik pengumpulan data ini yaitu interviewer dapat bertanya langsung kepada responden.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara, dimana dokumen merupakan catatan penting peristiwa yang telah berlalu (Sugiyono 2010).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi (Sugiyono, 2010). Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana metode kualitatif ini adalah suatu penelitian untuk mendeskripskan peristiwa perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga bisa

mengumpulkan data yang dibutuhkan, oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan disusun dengan cara sistematis dan mudah dipahami. Tampilan data (data display) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks, wawancara, ataupun bagan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

3.8 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan /Minggu																							
		Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Mei 2026				Juni 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			√																					
2	Pengeluaran Surat Keputusan					√																			
3	Persiapan Penyusunan Proposal						√	√	√																
4	Bimbingan Proposal									√	√	√													
5	Seminar Proposal												√												
6	Revisi Proposal													√	√										
7	Skripsi																	√	√	√	√	√	√	√	

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi cukup terimplementasi dengan baik. Karena penyediaan sarana dan prasarana sudah baik dan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat juga sudah baik. Walaupun sebagian masyarakat belum terlalu mengetahui tentang Kartu Identitas Anak, baik itu kegunaan maupun manfaatnya. Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi secara langsung oleh pihak Disdukcapil kepada masyarakat secara langsung.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi maka adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi lebih sering lagi melakukan sosialisasi terkait Kartu Identitas Anak tidak hanya dikota tetapi juga di perdesaan.

2. Sebaiknya Kartu Identitas Anak untuk di daerah perdesaan saat ingin masuk sekolah diwajibkan mempunyai Kartu Identitas Anak.
3. Sebaiknya Kartu Identitas Anak untuk di daerah perdesaan saat ingin berobat juga diwajibkan menggunakan Kartu Identitas Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afdal. (2015). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Rajawali pers.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, s. (2012). *Ilmu Administrasi Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Edi Suharto. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Edy Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana.
- George R. Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamdi. (2014). *Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kusumanegara, S. (2010). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Proses*. Yogyakarta : Pustaka Setia.
- Melayu S.P Hasibuan. (2015). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Meyzi Heriyanto, A. H. A. (2019). *Model Implementasi Program CSR Di Indonesia*. Pekanbaru : Taman Karya.
- Mulyadi. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pasalong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pratama, R. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Siagian, S. . (2011). *Administrasi Pembangunan: Konep, Dimensi, dan Strategis*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Siagian, S. . (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subianto. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Deepublish.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Bandung : Graha Ilmu.
- Suharto, E. (2020). *Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar*. Bandung : Alfabeta.
- Sutujo, W. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : widya.
- Syafi'i, I. (2010). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syafi'i, I. (2013). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Refika Aditama.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggara Pemerintah Daerah*. Jakarta : Alfabeta.
- Tahir, M. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Rajawali pers.
- Trisliatanto, D. A. (2020). *Metodelogi Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian dengan mudah*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Zulkifli. (2014). *Administrasi Perkantoran*. Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Perda. 2018. “Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan”.
- Permendagri. 2016. “Permendagri No 2 Tahun 2016 (KIA).”
- Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik. 2006. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006.” UU Republik Indonesia.

Jurnal

Akib, Haedar. 2010. “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana.” *Administrasi Publik* 1(1).

Arifin, Noormila Faujiah dan Muhammad Zainal. 2021. “*Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.*” 2(2):88–102.

Novianti, R. (2019). *Program Kartu Identitas Anak: Implementasi dan Dampaknya di Kabupaten/Kota.*

Perda, 2015, “Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”.

Skripsi

Rispatih Ningsi. (2021). “*Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.*”

Wahyu Safitri. (2022). “*Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.*”

Internat

Disdukcapil. n.d. “Kartu Identitas Anak (KIA).” 2021. Retrieved November 25, 2021 (<https://disdukcapil.kamparkab.go.id/kartu-identitas-anak-kia>)

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Kepala Dinas dan Staf bagian KIA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Maimuna
NPM	: 220411002
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Daftar Wawancara

A. Komunikasi :

1. Bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mensosialisasikan Program Kartu Identitas Anak kepada masyarakat dan media apa saja yang digunakan dalam menyampaikan informasi tersebut?

.....

2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan manfaat dari kartu Identitas Anak setelah dilakukan sosialisasi ?

.....

3. Apakah terdapat kendala dalam penyampaian informasi Program Kartu Identitas Anak kepada masyarakat ?

.....

4. Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pihak kecamatan, kelurahan/ desa, dan sekolah terkait Kartu Identitas Anak ?

.....

B. Sumber Daya

1. Bagaimana ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kuantan Tengah ?

.....

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (seperti komputer, jaringan internet, alat perekaman, dan blanko KIA) ?

.....

3. Bagaimana pengalokasian anggaran untuk sosialisasi, pelayanan, dan pemeliharaan sarana pendukung Kartu Identitas Anak ?

.....

C. Implementing Organizing

1. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak ?

.....

2. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak dan bagaimana penerapannya di lapangan?

.....

3. Apakah pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah diterapkan ?

.....

D. Dampak (Impact) dari Kebijakan

1. Bagaimana manfaat Kartu Identitas Anak yang dirasakan oleh masyarakat ?

.....

2. Apakah dampak Program Kartu Identitas Anak terhadap tertib Administrasi Kependudukan Anak ?

.....

3. Apakah Program Kartu Identitas Anak mempermudah anak dalam memperoleh layanan Publik tertentu (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) ?

.....
.....

Teluk Kuantan, Februari 2026

Informan

(.....)

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Masyarakat

A. Identitas Peneliti

Nama	: Maimuna
NPM	: 220411002
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Daftar Wawancara

A. Komunikasi

1. Apakah petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pernah melakukan sosialisasi terkait Program Kartu Identitas Anak di lingkungan Bapak/Ibu ?
.....
.....
.....
2. Bagaimana cara petugas menjelaskan manfaat dan prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak kepada masyarakat ?
.....
.....
.....
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kesulitan dalam memahami informasi atau persyaratan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ?
.....
.....
.....

B. Sumber Daya

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan petugas dalam melayani pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan catatan Sipi ?
.....
.....
.....
2. Apakah sarana dan prasarana (seperti tempat pelayanan, dan sistem pelayanan) sudah memadai ?
.....
.....

3. Apakah proses pelayanan Kartu Identitas Anak berjalan cepat atau justru memerlukan waktu yang lama dalam pembuatannya ?

.....

C. Implementing Organizing

1. Apakah prosedur pelayanan Kartu Identitas Anak mudah diikuti oleh masyarakat ?

.....

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas bekerja secara terkoordinasi dan tertib dalam melayani masyarakat ?

.....

3. Bagaimana sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ?

.....

D. Dampak (Impact) Kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat yang dirasakan setelah anak memiliki Kartu Identitas Anak ?

.....

2. Apakah Kartu Identitas Anak memudahkan anak dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, atau layanan lainnya ?

.....

3. Apakah masih ada kendala atau kekurangan dari program Kartu Identitas Anak yang dirasakan masyarakat ?

.....
.....

TelukKuantan, Februari 2026

Informan

(.....)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Gambar I : Bapak Tekad Kurniawan S.ST Selaku Kabid PIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar II, Ibu Desni Berlianti. SE Selaku Staf bagian KIA.



Gambar III, Ibu Julita Selaku masyarakat.



Gambar IV, Ibu Imelda SKM Selaku masyarakat.



Gambar V, Ibu Susi Susana. SE Selaku masyarakat.



Gambar VI, Ibu Jamalia Selaku masyarakat.



Gambar VII, Ibu Ratih Hasweni. S.Pd Selaku masyarakat.



Gambar VIII, Ibu Nurul Izzah. SE Selaku masyarakat.



Gambar IX, Ibu Indra Yanis Selaku masyarakat.



Gambar X, Ibu Rosi Saafitri Selaku masyarakat.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unlikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 011/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (SI) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (SI) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
NIDN : 1022018302
- b. Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Maimuna
 NPM : 220411002
 Judul Skripsi : Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (SI) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (SI) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: unisksuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 19 November 2025

Nomor : 102/FIS/UNIKS/XI/2025
 Lamp. : -
 Perihal : **Permohonan Pra Riset**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman
 Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
 Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
 di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Maimuna
NPM	: 220411002
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Unit Pelaksanaan Teknik dan Catatan Sipil Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Lokasi Penelitian	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian, wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan,
DEKAN SARIAN M. S.Sos., M.Si
 NIDN. 1008128002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmtsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmtsp.kuansing.go.id>
 TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 227/DPMTSP-PTSP/1.04.02.02/2025

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor.102/FIS/UNIKS/XI/2025 Tanggal 20 November 2025.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MAIMUNA
 NIM : 220411002
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 ILMU SOSIAL
 Jenjang Pendidikan : S1
 Alamat : TELUK KUANTAN
 Judul Penelitian : "IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANAAN TEKNIK DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
 Untuk melakukan Penelitian di : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
 Pada Tanggal : 21 November 2025

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
 Telp/Fax. (0760) 561629 Kode Pos 29362 E-Mail : disdukcapil@kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.7.22.1/Disdukcapil-Sekr/2026/96

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa:

Nama	:	Maimuna
Nim	:	220411002
Universitas	:	Islam Kuantan Singingi
Falkutas	:	Ilmu Sosial
Jurusan	:	Administrasi Negara

Sehubungan dengan nama tersebut diatas, telah melakukan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
 Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Teluk Kuantan, 05 Mei 2026
 An. Kepala Dinas Kependudukan
 dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Kuantan Singingi
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Dian Enggriani, S.Sos
 NIP. 19761113 201001 2 006



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MAIMUNA

NPM : 220411002

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. DESRIADI, S.Sos.,M.Si

2. SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK
(KIA) OLEH UNIT PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	20/10. 2015	1. Abstrak dimiringkan, 1 spasi 2. Margin Kertas		→	
2.	4/11 2015	1. Margin 2. Abstrak		→	
		3. Judul Miring 4. Metafora			
		5. Judul 2. psa 6. Judul 2.			
		7. Kertas putih 8. Dapur putih			

3	10/11.25	sec		✓	
4.	19/11.25	- Permasalahan diperbaiki - Rumus masalah	✓		
5.	26/11-25	- Tabel Teori uphulky - Versi Runtu . apt	✓		
		- hipotesis - Operasional Variabel			
	9/12-25	sec Upi pmpat	✓		
	14/26 /4	margin opseopasi		✓	
		teori yg kedepan			
		Dokumentasi			
		Diper pustaka			
	21/26 /4	Lampiran - Kata Pengantar - Daftar Isi - Daftar gambar		✓	

		- Kata Persembahan - surat Pernyataan bahwa skripsi plagiat - Abstrak			
		Lampiran belakang - Biodata - surat keterangan penelitian disidurcan			
		- SK Pembimbing - Daftar wawancara.			
9/5-2026	Ace ut & Syam an			✓	
7/5-26	Dea tumbuk Purben		✓		
	Logi Ret				
	fy tely masu				
	lia Bu fy kelua				
12/5-2026	Ace ut & Syam		✓		



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas Jaka Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Maimuna

NPM : 220411002

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Senin / 22 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Rika Ramadhani, S.P., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Maimuna

NPM : 220411002

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksanaan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 18 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Desriadi, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Maimuna
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Baru/26 Desember 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Belum Bekerja
 Alamat : Pulau Baru
 Alamat Email : Imaimuna2003@gmail.com
 Pendidikan : 1. Tahun 2016 LULUS SD Negeri 022 Pulau Baru
 2. Tahun 2019 LULUS SMP Negeri 5 Teluk Kuantan
 3. Tahun 2022 LULUS SMKN 2 Teluk Kuantan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 18 Juni 2026

Penulis

MAIMUNA
NPM.220411002